

Pendekatan Kebudayaan dalam Membangun Ketahanan dan Keamanan Insani: Sebuah Kajian Strategis

Cultural Approaches in Building Resilience and Human Security: A Strategic Study

Sugeng¹, Diana Fitriana², Widya Romasindah Aidy³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Article Info

Received: September 24, 2024

Revised: November 12, 2024

Accepted: December 4, 2024

Abstract: *This article explores the critical role of cultural approaches in building resilience and human security as a foundation for social sustainability, using philosophical methodology as the primary analytical framework. By examining culture as a resilience strategy, this article emphasizes how local cultural values, norms, and identities can strengthen community resilience in the face of global challenges, such as economic crises, climate change, and social conflict. Through a philosophical approach, particularly by analyzing concepts of culture and resilience, this article delves into how culture's ethical and ontological foundations can foster solidarity, enhance social cohesion, and build collective awareness oriented towards human security and well-being. Supported by literature studies and reflective analysis, this article demonstrates that a philosophically grounded cultural approach can offer a deeper and more contextual resilience strategy, creating a resilient and adaptive social environment where human security and sustainability are achieved in tandem.*

Keywords: Culture, Human Security, Sustainable Strategy

Abstrak: *Artikel ini mengeksplorasi peran penting pendekatan kebudayaan dalam membangun ketahanan dan keamanan insani sebagai fondasi keberlanjutan sosial. Van Peursen menguraikan perkembangan kebudayaan melalui tiga tahap utama: mitos, ontologi, dan fungsi, yang masing-masing mencerminkan evolusi cara manusia memahami dan mengelola realitas. Melalui pendekatan filsafat, serta analisis konsep-konsep budaya dan ketahanan, artikel ini menggali bagaimana landasan etis dan ontologis*



kebudayaan mampu menciptakan solidaritas, meningkatkan kohesi sosial, dan membangun kesadaran kolektif yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan insani. Dengan dukungan studi literatur dan analisis reflektif, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan kebudayaan yang berbasis filsafat dapat menawarkan strategi ketahanan yang lebih dalam dan kontekstual, menciptakan lingkungan sosial yang resilien dan adaptif, di mana keamanan insani dan keberlanjutan dapat dicapai secara beriringan. Perspektif Van Peursen memberikan kekuatan pada pemahaman budaya sebagai elemen dinamis yang mempengaruhi interpretasi realitas dan adaptasi sosial. Dengan pendekatan fenomenologis, Van Peursen mengaitkan kebudayaan dengan proses perubahan, di mana manusia terus beradaptasi dengan tantangan melalui simbol, makna, dan teknologi. Keterbatasan utama perspektif ini terletak pada kurangnya fokus spesifik pada aplikasi praktis di konteks kontemporer yang kompleks, terutama dalam menghadapi isu keberlanjutan dan keamanan insani yang memerlukan solusi multi-sektoral dan berbasis komunitas.

Kata kunci: *Kebudayaan, Keamanan Insani, Strategi Keberlanjutan*

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan elemen esensial dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya sekadar hasil dari kreativitas dan ekspresi manusia, tetapi juga cerminan dari cara manusia beradaptasi dengan lingkungan serta mengelola realitas yang dihadapinya. Dalam sejarah peradaban, kebudayaan telah menjadi fondasi yang menopang berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem sosial, nilai-nilai moral, hingga teknologi¹. Kebudayaan memberikan manusia kerangka untuk memahami dunia di sekitarnya dan cara untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Dalam konteks ini, Cornelis Anthonie van Peursen, seorang filsuf asal Belanda, menawarkan perspektif yang mendalam mengenai kebudayaan. Peursen tidak melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang *ajeg*, melainkan sebagai proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Menurut Peursen, kebudayaan adalah strategi manusia untuk bertahan hidup, adaptasi, dan mencapai kesejahteraan dalam lingkungan yang selalu berubah².

¹ EM. Wilson, *Organizational Culture as a Framework for male and Female progression and preferred management style* (PhD Thesis, Liverpool John Moores University).

² Sandra Harding, *Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?* *Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), (New York: Routledge, 1993): 49–82.

Selanjutnya, Peursen membagi perkembangan kebudayaan manusia ke dalam tiga tahapan utama: mitos (*myth*), ontologi (*ontology*), dan fungsi (*function*). Setiap tahapan ini mewakili cara manusia memahami dan mengelola dunia di sekitarnya³. *Pertama*, pada tahap mitos manusia cenderung menjelaskan dunia dan segala fenomena yang terjadi di sekitarnya melalui cerita-cerita mitos. Mitos-mitos ini tidak hanya merupakan cerita belaka, tetapi juga kaya akan simbolisme dan sarat dengan makna yang mendalam, yang membantu manusia dalam memahami dan menginterpretasikan berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Pada tahap mitos, manusia belum memerlukan penjelasan yang rasional atau berbasis bukti empiris. Sebaliknya, pengetahuan disampaikan dan diterima secara intuitif dan emosional. Mitos-mitos berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menyatukan pengalaman manusia dengan alam dan masyarakat, memberikan penjelasan yang dianggap sah tentang asal-usul alam semesta, fenomena alam, dan kehidupan manusia. Dalam masyarakat yang hidup pada tahap ini, mitos memainkan peran penting dalam membentuk norma, nilai, dan identitas budaya.

Kedua, tahap ontologi merupakan fase penting dalam evolusi kebudayaan manusia, di mana terjadi pergeseran mendasar dari cara berpikir yang mitologis menuju cara berpikir yang lebih rasional dan logis. Dalam konteks ini, ontologi merujuk pada studi tentang “ada” atau “eksistensi,” di mana manusia mulai mengeksplorasi dan memahami hakikat dari realitas secara lebih mendalam dan sistematis. Pada tahap ini, manusia tidak lagi puas dengan penjelasan mitologis yang sering kali bersifat simbolis dan penuh dengan misteri. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, kehidupan, dan keberadaan mereka sendiri. Ini adalah masa di mana manusia mulai mencari jawaban yang tidak hanya didasarkan pada kepercayaan atau tradisi, tetapi juga pada logika, pengalaman, dan pengamatan.

Ilmu pengetahuan (*sains*) dan filsafat mulai muncul sebagai disiplin-disiplin yang memberikan kerangka untuk memahami dunia secara lebih terstruktur. Ilmu pengetahuan, dengan metode empirisnya, memungkinkan manusia untuk mengamati, bereksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang dapat diukur dan diulang⁴. Sementara itu, filsafat memberikan landasan teoritis untuk merenungkan

³ VAN Peursen, C.A, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018): 18.

⁴ John Losee, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Fourth Edition (New York: Oxford University Press, 2001): 26.

konsep-konsep abstrak seperti keberadaan, waktu, ruang, dan penyebab. Perkembangan ini menandai perubahan penting dalam kebudayaan, di mana manusia mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya misterius dan tidak dapat dipahami, tetapi sebagai sesuatu yang dapat diuraikan dan dijelaskan melalui hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip logika.

Pada tahap ontologi, kebudayaan manusia menjadi semakin terhubung dengan upaya untuk menjelaskan realitas dalam istilah-istilah yang dapat dipahami secara rasional dan ilmiah. Manusia mulai bergerak dari sekadar menerima mitos sebagai kebenaran mutlak menuju pemahaman yang lebih mendalam dan rasional mengenai realitas⁵. Kebudayaan pada tahap ini ditandai oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, di mana keduanya berfungsi untuk menjelaskan dunia secara lebih sistematis dan terstruktur. Di sinilah manusia mulai mempertanyakan dan menganalisis fenomena yang terjadi di sekitar mereka, mencari penjelasan yang logis dan berbasis pada pengetahuan yang terukur, daripada hanya mengandalkan cerita-cerita mitos yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketiga, tahap fungsi merupakan puncak dari perkembangan kebudayaan di mana manusia mulai berfokus pada kegunaan praktis dari pengetahuan yang telah dikumpulkan. Di sini, pemahaman tentang realitas tidak hanya bertujuan untuk mengetahui, tetapi juga untuk mengendalikan dan memanipulasi dunia demi kepentingan manusia. Teknologi dan ilmu terapan menjadi dominan, dengan penekanan pada bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk menciptakan hasil yang konkret dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase ini, manusia tidak lagi sekadar mencari penjelasan tentang dunia atau hakikat keberadaan, melainkan berupaya untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk memberikan solusi praktis terhadap berbagai masalah kehidupan. Kemajuan dalam teknologi memungkinkan manusia untuk mengendalikan dan memodifikasi lingkungan mereka, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebudayaan pada tahap fungsi diukur berdasarkan kemampuannya untuk memberikan hasil yang konkret dan bermanfaat. Nilai suatu gagasan, alat, atau teknologi ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Dengan demikian, segala aspek kebudayaan—mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, hingga seni dan etika—difokuskan

⁵ Wendy Brown, *Undoing the Demos Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*, (Cambridge: MIT Press, 2011): 17.

pada bagaimana sesuatu dapat berfungsi secara efektif dan mendukung kehidupan manusia dalam konteks yang nyata dan operasional⁶.

Melalui pemahaman mendalam tentang konsep kebudayaan Van Peursen, kita dapat melihat bahwa kebudayaan adalah kunci untuk memahami bagaimana manusia bisa terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang selalu berubah. Kebudayaan tidak hanya menjadi warisan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi panduan bagi manusia untuk merespons dinamika sosial, teknologi, dan lingkungan yang dihadapinya. Dengan demikian, mempelajari kebudayaan dalam perspektif Van Peursen memberi kita wawasan tentang bagaimana manusia dapat terus mengembangkan strategi yang efektif untuk bertahan hidup dan mencapai keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan⁷. Kebudayaan, dalam pandangan ini, bukan sekadar hasil karya manusia, tetapi juga strategi yang mendasar untuk keberlanjutan hidup manusia di bumi.

Kebudayaan sebagai strategi berkelanjutan menunjukkan bahwa adaptasi, inovasi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan adalah kunci untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks modern, pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang akar kebudayaan serta penerapan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan global. Van Peursen memberikan kerangka pemikiran yang berguna untuk memahami kebudayaan sebagai strategi berkelanjutan yang tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dan berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia dari masa ke masa⁸.

Pemikiran tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). SDGs merupakan serangkaian tujuan global yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Van Peursen menawarkan kerangka konseptual yang kaya untuk

⁶ Hans Haferkamp, and Neil J. Smelser, editors *Social Change and Modernity*. (Berkeley: University of California Press, c1992 1991) <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6000078s/>.

⁷ Van Niekerk, Arno J. "Inclusive Economic Sustainability: SDGs and Global Inequality", *Sustainability* 12, (No. 13: 5427, 2020). <https://doi.org/10.3390/su12135427>.

⁸ N. P., K. B. Mekha Hariram, Vipinraj Suganthan, and K. Sudhakar. 2023. "Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability" *Sustainability* 15, (No. 13: 10682). <https://doi.org/10.3390/su151310682>.

memahami bagaimana kebudayaan dapat mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan⁹. Dengan menekankan pentingnya kohesi sosial, pengetahuan, teknologi, adaptasi, dan nilai-nilai etis, Van Peursen memberikan wawasan yang relevan bagi upaya global untuk mencapai SDGs. Kebudayaan, dalam perspektifnya, bukan hanya warisan masa lalu tetapi juga alat strategis untuk memastikan bahwa manusia dapat terus berkembang dalam harmoni dengan diri mereka sendiri, satu sama lain, dan lingkungan mereka.

Melalui kebudayaan, manusia mampu memahami dirinya lebih dalam, membina hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain, serta menjaga keselarasan dengan lingkungan. Dalam konteks ini, kebudayaan menjadi instrumen yang hidup dan dinamis dan memungkinkan kita menata cara hidup, membentuk nilai, dan menciptakan struktur sosial yang memperkuat ikatan antarindividu dan antargenerasi. Kebudayaan bukan hanya sebuah identitas, tetapi juga sebuah kompas yang mengarahkan langkah manusia ke masa depan, sambil tetap berakar pada nilai-nilai yang memupuk keberlanjutan dan keberagaman. Manusia tidak hanya berkembang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, berupaya untuk mencapai kesejahteraan bersama dan melindungi bumi yang mereka huni.

Metode Penelitian

Untuk mengkaji relevansi pemikiran Van Peursen dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), artikel ini menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep kunci dalam pemikiran Van Peursen, khususnya mengenai tahap-tahap kebudayaan, dan menilai relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada penguraian dan klarifikasi konsep-konsep seperti “mitos,” “ontologi,” dan “fungsi,” serta menghubungkannya dengan konsep-konsep inti dalam SDGs, seperti “keberlanjutan,” “kesetaraan,” dan “kesejahteraan”. Melalui pendekatan filsafat, serta analisis konsep-konsep budaya dan ketahanan, artikel ini menggali bagaimana landasan etis dan ontologis kebudayaan mampu menciptakan solidaritas, meningkatkan kohesi sosial, dan membangun kesadaran kolektif yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan insani.

⁹ S. Fukuda-Parr, “From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development”, *Gender & Development*, Vol. 24, No. 1 (February, 2016): 43–52.

Artikel ini juga menggunakan pendekatan teori keamanan insani yang memperluas konsep keamanan tradisional untuk mencakup aspek kesejahteraan manusia yang lebih luas, termasuk stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya. Isu keamanan insani meliputi ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan erosi budaya akibat globalisasi dan urbanisasi yang cepat. Mengimplementasikan pendekatan keamanan insani yang menekankan pelestarian budaya membantu membangun ketahanan di komunitas lokal, serta mengatasi akar masalah ketidakamanan, seperti kemiskinan dan ketimpangan, yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Pendekatan keamanan insani yang melibatkan pelestarian lingkungan sangat relevan di Indonesia, mengingat kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang mengancam keamanan dan ketahanan masyarakat. Degradasi lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan bencana alam tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menyebabkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, seperti kehilangan mata pencaharian dan migrasi paksa. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat.

Pendekatan kebudayaan dalam studi keamanan memperkaya pemahaman kita dengan melihat keamanan bukan hanya sebagai upaya perlindungan dari ancaman eksternal, tetapi sebagai kondisi yang dibangun dari dalam masyarakat itu sendiri, melalui hubungan sosial, nilai-nilai bersama, dan rasa keterikatan dengan lingkungan. Perspektif ini menawarkan wawasan baru karena memungkinkan kita untuk memahami keamanan dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Dalam pendekatan ini, keamanan dipandang sebagai hal yang dinamis dan kontekstual, di mana faktor sosial, budaya, dan lingkungan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tantangan-tantangan kompleks seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan ancaman terhadap identitas budaya membutuhkan respons yang tidak hanya teknis tetapi juga memahami akar sosial dan budaya dari rasa aman dan ketahanan masyarakat.

Pembahasan

A. Cornelis Anthonie van Peursen: Kehidupan dan Sketsa Pemikiran

Cornelis Anthonie van Peursen, lahir di Zoeterwoude pada tahun 1920, adalah seorang filsuf dan teolog terkemuka di Belanda yang dikenal luas atas kontribusinya dalam berbagai bidang filsafat, termasuk

fenomenologi, hermeneutika, dan filsafat kebudayaan. Pendidikan awalnya dimulai di Universitas Leiden, di mana ia mendalami filsafat dan teologi. Van Peursen melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1959 dengan disertasi yang berjudul "Theorie van de Objectiviteit". Setelah memperoleh gelar doktor, Van Peursen memasuki dunia akademik dan menjadi dosen filsafat. Ia mengajar di berbagai universitas terkemuka di Belanda, termasuk Universitas Groningen dan Universitas Nijmegen, di mana ia kemudian diangkat menjadi profesor filsafat¹⁰. Dalam peran ini, Van Peursen banyak menulis dan mengajar tentang berbagai topik, dari fenomenologi hingga filsafat kebudayaan.

Karya-karya Van Peursen menjadi rujukan penting dalam diskursus filsafat modern, terutama dalam memahami bagaimana manusia menginterpretasikan dunia melalui lensa kebudayaan, simbolisme, dan agama. Di antara karyanya yang paling dikenal adalah "Strategi Kebudayaan," "Manusia dan Kebudayaan," serta "Manusia dan Agama." Melalui karya-karya ini, Van Peursen mengeksplorasi cara-cara di mana kebudayaan membentuk persepsi manusia tentang realitas, serta peran penting simbol dan agama dalam struktur sosial dan intelektual.

Dengan pendekatan yang mendalam dan reflektif, Van Peursen berhasil menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam upayanya untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia. Kontribusinya dalam fenomenologi dan hermeneutika, khususnya, telah memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana manusia tidak hanya hidup di dalam dunia, tetapi juga membentuk dan diubah oleh dunia melalui makna yang mereka ciptakan. Cornelis Anthonie van Peursen meninggal pada tahun 1996, tetapi pengaruhnya terus dirasakan dalam dunia filsafat dan teologi. Karyanya tetap menjadi landasan penting bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara kebudayaan, simbol, dan agama dalam konteks pengalaman manusia yang lebih luas¹¹.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebudayaan menjadi landasan utama karena mencerminkan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan satu sama lain. Kebudayaan tidak hanya mencakup nilai-nilai dan norma-norma sosial, tetapi juga teknologi, pengetahuan, dan praktik yang diterapkan untuk mengelola sumber daya alam. Rasionalitas pemikiran Van Peursen tentang strategi kebudayaan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan keamanan insani

¹⁰ C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993): 30

¹¹ C.A. Van Peursen, *Filsafat Ilmu*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014): 16.

terletak pada pemahaman bahwa kebudayaan adalah fondasi dari segala bentuk interaksi manusia dengan dunia di sekitar mereka. Dengan mengakui kebudayaan sebagai elemen kunci dalam strategi keberlanjutan dan keamanan, Van Peursen menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan manusiawi terhadap pembangunan, yang berfokus pada keseimbangan antara pemahaman, adaptasi, dan penerapan nilai-nilai yang mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan dan aman.

B. Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Sosial

Cornelis Anthonie van Peursen menekankan bahwa kebudayaan memiliki peran krusial dalam menciptakan kohesi sosial dan identitas kolektif, yang merupakan elemen fundamental untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sosial. Menurut Van Peursen, kebudayaan, terutama pada tahap mitos, berfungsi sebagai alat yang menyatukan komunitas melalui narasi kolektif yang sarat dengan makna simbolis. Narasi ini tidak hanya memberikan stabilitas sosial tetapi juga menjadi panduan moral bagi masyarakat. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pemikiran Van Peursen sangat relevan, khususnya dengan SDG 16 yang bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan¹². Kohesi sosial yang kuat, yang dibentuk oleh kebudayaan, memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dengan lebih efektif dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan (SDG 1) dan ketidaksetaraan (SDG 10).

Dengan narasi kolektif yang mengakar kuat dalam budaya, masyarakat dapat membangun identitas bersama yang inklusif, yang pada gilirannya menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya damai dan stabil, tetapi juga inklusif, di mana semua anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih jauh, narasi kebudayaan yang memperkuat kohesi sosial juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi ketidaksetaraan. Ketika masyarakat diikat oleh nilai-nilai bersama yang menekankan keadilan dan solidaritas, mereka lebih mungkin untuk mengembangkan

¹² D. Le Blanc, "Towards integration at last? The Sustainable Development Goals as a network of targets", *Sustainable Development*, 23, (No. 3, 2015): 176–87.

kebijakan dan tindakan yang mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, sesuai dengan tujuan SDG 10¹³.

Dalam konteks global saat ini, di mana masyarakat semakin heterogen dan kompleks, peran kebudayaan sebagai alat dialog menjadi semakin penting. Dialog antarbudaya yang efektif dapat membantu mengurangi konflik dan memperkuat kerjasama, yang sejalan dengan SDG 16 yang berfokus pada menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Ketika kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat menemukan titik temu melalui nilai-nilai budaya yang dimiliki bersama, mereka lebih mampu mengatasi tantangan-tantangan sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan¹⁴. Hal ini penting mengingat bahwa tantangan-tantangan ini seringkali memiliki akar yang dalam dalam ketidakadilan historis dan ketidakseimbangan kekuasaan, yang hanya dapat diatasi melalui dialog yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai medium untuk pendidikan keberlanjutan. Dalam perspektif Van Peursen, kebudayaan tidak hanya melibatkan transmisi nilai-nilai dan norma-norma, tetapi juga pendidikan mengenai cara hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan budaya, masyarakat dapat diajarkan untuk memahami pentingnya keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan, dari cara mereka menggunakan sumber daya alam hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama. Hal ini sangat relevan dengan SDG 4, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua¹⁵. Pendidikan yang berakar pada kebudayaan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan mendorong tindakan yang mendukung pelestarian lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketidaksetaraan. Dengan demikian, kebudayaan dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebudayaan dapat menjadi sumber inovasi sosial, yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Inovasi sosial sering kali lahir dari interaksi antara nilai-nilai budaya tradisional dan tantangan-tantangan kontemporer. Dalam hal ini, kebudayaan menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan solusi kreatif yang sesuai dengan konteks lokal mereka,

¹³ A. Persson, Weitz, N. and Nilsson, M. "Follow-up and review of the Sustainable Development Goals: Alignment vs. internalisation", *RECIEL* 25, (No. 1): 59-68.

¹⁴ A. Angelsen, and Rudel, T. K. 2013. "Designing and implementing effective REDD+ policies: A forest transition approach", *Review of Environmental Economics and Policy* 7, (No. 1): 91-113.

¹⁵ E.B. Barbier, "Poverty, development, and environment", *Environment and Development Economics* 15, (No. 4, 2010), 635-60.

sambil tetap berkontribusi pada tujuan global. Secara keseluruhan, pemikiran Van Peursen tentang kebudayaan menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk memahami bagaimana kebudayaan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan keamanan insani. Dengan melihat kebudayaan sebagai alat untuk menciptakan kohesi sosial, memfasilitasi dialog, mendukung pendidikan keberlanjutan, dan mendorong inovasi sosial, Van Peursen menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya elemen tambahan, tetapi komponen inti dari setiap strategi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan¹⁶.

C. Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi

Van Peursen melihat kebudayaan sebagai sebuah sistem nilai yang membentuk kerangka etika bagi tindakan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, etika dan nilai-nilai kebudayaan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan¹⁷. Misalnya, konsep keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang tertanam dalam kebudayaan dapat menjadi panduan bagi praktik ekonomi yang berkelanjutan. Nilai-nilai ini mendorong perusahaan dan individu untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan ekonomi mereka, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Ini sangat relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ekonomi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan lingkungan.

Pemikiran Van Peursen juga relevan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Kebudayaan memberikan kerangka kerja yang mengatur bagaimana sumber daya digunakan dan dikelola. Dalam banyak kebudayaan tradisional, terdapat nilai-nilai yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan pelestariannya untuk generasi mendatang¹⁸. Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengembangkan model

¹⁶ Barrett, C. B. "Rural poverty dynamics: Development policy implications", *Agricultural Economics* 32, (No. 1, 2005): 45-60.

¹⁷ M. Call, T. Mayer, Sellers, S. *et al.*, "Socio-environmental drivers of forest change in rural Uganda", *Land Use Policy* 62, (2017): 49-58.

¹⁸ S.H. Cheng, S. Ahlroth, S. Onder, *et al.* "What is the evidence for the contribution of forests to poverty alleviation? A systematic map protocol", *Environmental Evidence* 6, (No. 1, 2017): 10.

ekonomi yang menghormati batasan ekologis dan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta relevan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah diminimalkan dan sumber daya digunakan secara efisien.

Lebih lanjut van Peursen berpendapat bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keterhubungan komunitas lokal dengan akar mereka, meskipun mereka berada di bawah tekanan dan pengaruh ekonomi global yang semakin kuat. Dalam pandangan Van Peursen, kebudayaan bukan hanya sekumpulan tradisi atau kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga fondasi yang memberi identitas, makna, dan rasa memiliki bagi suatu komunitas¹⁹. Identitas budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda keberadaan, tetapi juga sebagai elemen esensial yang menyediakan kontinuitas dan stabilitas di tengah perubahan yang cepat dan sering kali tak terduga. Dalam konteks globalisasi, di mana komunitas-komunitas lokal sering kali terpapar pada arus perubahan ekonomi yang masif dan penetrasi nilai-nilai eksternal, kebudayaan berperan sebagai benteng yang melindungi identitas lokal dari erosi. Ketika komunitas mampu mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka, mereka tetap terhubung dengan akar sejarah dan tradisi yang membentuk mereka, memberikan mereka pijakan yang kuat untuk menghadapi tantangan modern.

Identitas budaya juga memberikan rasa kontinuitas, yaitu kesadaran bahwa meskipun ada perubahan, ada sesuatu yang stabil dan tak tergoyahkan dalam keberadaan komunitas. Ini sangat penting dalam menghadapi perubahan, baik itu perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi, karena kontinuitas tersebut memberikan rasa aman dan kepastian di tengah ketidakpastian yang sering kali dibawa oleh perubahan. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan atau bahkan mengorbankan aspek budaya dapat membawa dampak negatif yang serius. Jika kebudayaan lokal diabaikan dalam proses pembangunan, ada risiko besar bahwa identitas budaya tersebut akan terkikis. Erosi identitas budaya tidak hanya berarti hilangnya tradisi atau kebiasaan, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih luas²⁰. Ketika komunitas kehilangan identitas budayanya, mereka juga kehilangan rasa memiliki yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok. Tanpa identitas yang jelas, kohesi sosial bisa melemah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan fragmentasi sosial, ketegangan, dan bahkan konflik.

¹⁹ N. Doswald, R. Munroe, R. Roe, D., *et al.*, "Effectiveness of ecosystem-based approaches for adaptation: Review of the evidence-base", *Climate and Development* 6, (No. 2, 2014): 185-201.

²⁰ C. Sandbrook, M. Walpole (eds.) *Biodiversity conservation and poverty alleviation: Exploring the evidence for a link (1st ed.)*, (Hoboken: John Wiley & Sons): 43-59.

Ketidakstabilan sosial ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bisa mengganggu proses pembangunan itu sendiri, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memicu masalah sosial yang lebih kompleks.

Bagi Van Peursen, pentingnya mempertahankan identitas budaya dalam konteks pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mencakup upaya untuk menjaga dan memberdayakan kebudayaan lokal sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Ini berarti bahwa kebijakan dan program pembangunan harus didesain dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan keunikan yang ada dalam komunitas²¹. Sebagai contoh, pengembangan sektor ekonomi seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat dan melestarikan warisan budaya lokal. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga menjadi aset yang mendukung diversifikasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai penggerak utama yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Teknologi memungkinkan penerapan praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, serta membuka peluang baru dalam industri yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan demikian, inovasi teknologi menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan sumber daya alam atau kesejahteraan sosial. Van Peursen juga menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan kebudayaan dan masyarakat. Dalam tahap ontologi, pendidikan berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan ilmiah dan meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam proses inovasi. Sasaran ini sejalan dengan tujuan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), yang menekankan bahwa pendidikan harus mendukung pengembangan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan inovasi²².

²¹ S.K. Pattanayak and E.O. Sills, "Do tropical forests provide natural insurance? The microeconomics of non-timber forest product collection in the Brazilian Amazon", *Land Economics*, 77, No. 4, 2001): 595–612.

²² Kanowski P, Yao D, Wyatt S. SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan Hutan - 'Benang Emas.' Dalam: Katila P, Pierce Colfer CJ, de Jong W, Galloway G, Pacheco P, Winkel G, eds. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Dampaknya terhadap Hutan dan Masyarakat*, (Cambridge University Press; 2019): 108-145.

Tahap ontologi juga mencerminkan pentingnya infrastruktur yang mendukung dan inovasi berkelanjutan, sesuai dengan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)²³. Van Peursen memahami bahwa perkembangan kebudayaan harus didukung oleh struktur-struktur yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Infrastruktur yang berkelanjutan mencakup segala hal, mulai dari energi bersih, transportasi yang efisien, hingga teknologi informasi yang memungkinkan konektivitas dan kolaborasi global. Inovasi di bidang ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mengurangi ketidaksetaraan, dan memperkuat daya tahan ekonomi terhadap krisis.

Lebih jauh, pendidikan berkualitas dan infrastruktur yang inovatif menjadi dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam proses ini. Pendidikan memastikan bahwa individu siap untuk berkontribusi dalam ekonomi yang semakin kompleks dan berorientasi pada keberlanjutan, sementara infrastruktur menyediakan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, tahap ontologi dalam pemikiran Van Peursen bukan hanya relevan untuk pemahaman filosofis tentang kebudayaan, tetapi juga memberikan wawasan penting bagi strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan²⁴. Dengan mengintegrasikan pengetahuan, inovasi, pendidikan, dan infrastruktur yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang dengan cara yang adil dan berkelanjutan untuk semua.

D. Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan

Tahap fungsi dalam pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen adalah fase di mana manusia mulai fokus pada penerapan pengetahuan dan teknologi secara praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari²⁵. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan,

²³ Amr Adel, and Noor HS Alani, "Human-Centric Collaboration and Industry 5.0 Framework in Smart Cities and Communities: Fostering Sustainable Development Goals 3, 4, 9, and 11 in Society 5.0", *Smart Cities*, 7, (No. 4): 1723-1775. <https://doi.org/10.3390/smartcities7040068>.

²⁴ N. Rulandari, "Study of Sustainable Development Goals (SDGs) Quality Education in Indonesia in the First Three Years", *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4, (No. 2, 2021): 2702-2708.

²⁵ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisius, dan BPK Gunung Mulia, 1976): 31.

pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat penting. Van Peursen menekankan bahwa pengetahuan dan teknologi harus diterapkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga untuk melindungi dan melestarikan lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Sasaran ini sejalan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, seperti SDG 13 (Tindakan terhadap Perubahan Iklim), SDG 14 (Kehidupan Bawah Laut), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat)²⁶.

Dalam menghadapi perubahan iklim, teknologi berperan penting dalam mengembangkan energi bersih, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. Van Peursen akan berpendapat bahwa aplikasi praktis dari teknologi ini harus difokuskan pada mitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi terhadap kondisi iklim yang berubah. Ini mencakup segala hal dari teknologi energi terbarukan hingga sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap cuaca ekstrem. Ekosistem laut menghadapi ancaman serius dari polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim. Pendekatan fungsional Van Peursen akan menekankan penggunaan teknologi untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap laut, seperti melalui pengembangan teknologi pemantauan laut yang lebih baik, pengurangan polusi plastik, dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan²⁷. Aplikasi teknologi ini harus dirancang untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil mendukung kesejahteraan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Ekosistem darat, termasuk hutan, padang rumput, dan lahan basah, sangat penting untuk kehidupan di bumi. Pendekatan Van Peursen dalam tahap fungsi akan mencakup penerapan teknologi untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan, restorasi habitat yang rusak, dan perlindungan spesies yang terancam punah. Ini juga mencakup penggunaan teknologi seperti pemetaan satelit dan drone untuk memantau perubahan dalam ekosistem darat dan mendukung upaya konservasi yang lebih efektif. Pendekatan fungsional Van Peursen menekankan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, manusia harus mengelola sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Ide ini memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan²⁸.

²⁶ H.C.J. Godfray, J.R. Beddington, I.R. Crute, et al. 2010. "Food security: The challenge of feeding 9 billion people", *Science*, (Vol. 327): 812-18.

²⁷ I. J. Gordon, H. H. Prins, and G. R. Squire, (eds.), *Food production and nature conservation: Conflicts and solutions*, (London: Routledge, 2017): 42.

²⁸ A. Ickowitz, A. Jones, D. Rowland, F. Powell, and T. Sunderland, "Agricultural intensification, dietary diversity, and markets in the global food security narrative", *Global*

Tahap fungsi dalam pemikiran Van Peursen mengajak kita untuk melihat pengetahuan dan teknologi sebagai alat-alat praktis yang harus diterapkan untuk memberikan solusi nyata terhadap tantangan lingkungan. Ini sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Dengan memfokuskan pada aplikasi praktis dari teknologi, Van Peursen memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

E. Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Keamanan Insani

Pembangunan berkelanjutan dan keamanan insani adalah dua konsep yang saling terkait dan saling memperkuat. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, keamanan insani adalah pendekatan holistik yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti keamanan ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan politik. Ketika digabungkan, kedua konsep ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan aman bagi seluruh umat manusia. Keamanan insani, dalam konteks ini, berperan sebagai elemen inti yang memastikan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak hanya menguntungkan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap individu²⁹.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam perspektif keamanan insani adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, di mana semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berkembang tanpa menghadapi risiko yang mengancam kehidupan mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman-ancaman fisik, seperti bencana alam dan perubahan iklim, serta ancaman-ancaman sosial, seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Keamanan insani dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa dimensi kunci, yang semuanya harus dipertimbangkan untuk mencapai

Food Security, 20, (2019): 9-16.

²⁹ UNDP, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press, 1994): 24-25.

kesejahteraan yang berkelanjutan, meliputi³⁰: Keamanan Ekonomi (*Economic Security*), Keamanan Pangan (*Food Security*), Keamanan Kesehatan (*Health Security*), dan Keamanan Politik (*Political Security*).

1. Keamanan Ekonomi (*Economy Security*)

Keamanan ekonomi adalah konsep yang merujuk pada kemampuan individu, komunitas, dan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka secara berkelanjutan, tanpa menghadapi ancaman signifikan yang dapat menggoyahkan stabilitas keuangan dan kesejahteraan mereka. Ini mencakup aspek-aspek penting seperti akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang stabil, serta jaminan terhadap risiko-risiko ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan pasar. Salah satu pilar utama keamanan ekonomi adalah akses terhadap pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak hanya berarti memiliki pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang memberikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Pekerjaan yang layak juga mencakup kondisi kerja yang aman, jam kerja yang wajar, dan hak-hak pekerja yang dihormati. Ketika individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, mereka memiliki dasar yang kuat untuk mencapai keamanan ekonomi³¹.

Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dapat membawa risiko jangka panjang yang mengancam keamanan ekonomi generasi mendatang. Oleh karena itu, keamanan ekonomi harus mencakup strategi untuk mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan atau menciptakan ketidaksetaraan sosial yang ekstrem. Keamanan ekonomi merupakan kondisi di mana individu, komunitas, dan negara merasa yakin bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara berkelanjutan, tanpa harus menghadapi ancaman yang serius terhadap stabilitas keuangan mereka³². Dalam skala global, keamanan ekonomi juga bergantung pada kerja sama internasional yang mendukung stabilitas dan keadilan ekonomi global. Dengan memastikan keamanan ekonomi, kita

³⁰ I. Robeyns, "The Capability Approach: A Theoretical Survey", *Journal of Human Development* 6, (No. 1, 2005): 93-117.

³¹ V. Singh, "An Impact and Challenges of Sustainable Development in Global Era", *Journal of Economics and Development Studies* 2, (No. 2, 2014): 327-337.

³² Stewart Frances, *Development and Security, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3*, (London: University of Oxford, 2004): 41.

dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Keamanan Pangan (*Food Security*)

Keamanan pangan adalah konsep mendasar yang mencerminkan kondisi di mana setiap orang, di setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka dan preferensi makanan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Keamanan pangan tidak hanya terbatas pada ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup akses yang adil, distribusi yang efisien, serta stabilitas dalam pasokan dan konsumsi pangan. Akses fisik terhadap makanan tergantung pada ketersediaan makanan di pasar atau melalui produksi lokal. Ketersediaan ini dipengaruhi oleh infrastruktur yang baik, sistem transportasi yang efisien, dan rantai pasokan yang kuat³³. Di sisi lain, akses ekonomi terhadap pangan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Harga pangan yang terjangkau dan pendapatan yang memadai adalah kunci untuk memastikan bahwa semua orang dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka.

Ketersediaan pangan yang cukup dan beragam adalah elemen kunci dalam mencapai keamanan pangan. Pangan yang tersedia harus mencakup berbagai jenis makanan yang menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk diet yang sehat dan seimbang. Ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang esensial bagi kesehatan manusia. Produksi pangan lokal memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan makanan, terutama di wilayah pedesaan³⁴. Pertanian yang berkelanjutan dan diversifikasi tanaman dapat membantu menjaga stabilitas dan variasi pangan sepanjang tahun. Selain itu, perdagangan internasional juga berkontribusi pada keamanan pangan dengan memungkinkan negara-negara untuk mengimpor makanan yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada impor bisa meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan.

Stabilitas pangan berarti bahwa akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi harus dipertahankan sepanjang waktu, tanpa gangguan yang signifikan. Stabilitas ini bisa terancam oleh berbagai faktor seperti

³³ Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007): 40.

³⁴ Angga Nurdin Rahmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Alfabeta, Bandung, 2015): 258.

bencana alam, perubahan iklim, konflik, dan fluktuasi ekonomi. Sistem pangan harus dirancang untuk tahan terhadap guncangan, baik itu akibat bencana alam, konflik, atau perubahan harga pasar. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas pangan. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi stabilitas pangan global, dan adaptasi pertanian terhadap kondisi cuaca yang berubah adalah kunci untuk memastikan bahwa produksi pangan tetap stabil di masa depan.

Keamanan pangan adalah tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional. Ketika populasi dunia terus bertambah, kebutuhan akan makanan yang cukup dan bergizi juga meningkat. Di saat yang sama, perubahan iklim, degradasi lahan, dan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan semakin memperumit upaya untuk mencapai keamanan pangan. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengembangkan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan pangan global adalah dengan mengurangi pemborosan makanan. Setiap tahun, jumlah yang signifikan dari makanan yang diproduksi hilang atau terbuang sebelum mencapai konsumen. Mengurangi pemborosan makanan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi tekanan pada sistem pangan global. Untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerja sama internasional, inovasi dalam produksi pangan, perlindungan terhadap risiko lingkungan dan ekonomi, serta kebijakan dan pendidikan yang mendukung³⁵.

Keamanan pangan adalah aspek krusial dari kesejahteraan manusia dan stabilitas global. Ini tidak hanya mencakup ketersediaan makanan, tetapi juga akses yang adil, keamanan, kualitas nutrisi, dan stabilitas dalam pasokan pangan. Untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerja sama internasional, inovasi dalam produksi pangan, perlindungan terhadap risiko lingkungan dan ekonomi, serta kebijakan dan pendidikan yang mendukung³⁶. Dengan mengamankan pangan bagi semua, kita tidak hanya menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan stabilitas sosial di seluruh dunia.

³⁵ S Neil Mac Farlane and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, (Bloomington: Indiana University Press, 2006): 11.

³⁶ David Roberts, *Human Insecurity Global Structures of Violence*, (New York: Zed Book, 2008): 16.

3 Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Keamanan kesehatan adalah konsep penting yang mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman kesehatan yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Keamanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga pada pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Pilar utama keamanan kesehatan adalah memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas³⁷.

Keamanan kesehatan menuntut bahwa pelayanan kesehatan harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ini berarti mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh individu dan keluarga, terutama di negara-negara dengan sistem kesehatan yang belum optimal. Sistem asuransi kesehatan universal atau skema subsidi adalah contoh upaya untuk memastikan bahwa tidak ada yang harus menanggung beban keuangan yang berat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, layanan kesehatan juga harus berkualitas, menyediakan perawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti, dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan dilatih dengan baik dan memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk melakukan pekerjaan mereka. Kesiapsiagaan terhadap ancaman kesehatan adalah komponen penting dari keamanan kesehatan³⁸. Upaya ini melibatkan kemampuan sistem kesehatan untuk mendeteksi, merespons, dan mengatasi ancaman kesehatan secara cepat dan efektif, seperti wabah penyakit menular, bencana alam, atau krisis kemanusiaan lainnya.

Keamanan kesehatan memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memantau dan mendeteksi ancaman kesehatan sejak dini. Sistem ini mencakup infrastruktur teknologi, laboratorium, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah penyakit atau ancaman lainnya. Selain itu, kesiapan untuk merespons krisis kesehatan juga merupakan kunci dalam keamanan kesehatan. Ini berarti memiliki rencana darurat yang jelas, tim medis yang terlatih, dan sumber daya yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat

³⁷ C. K. Khoury, A. D. Bjorkman, H. Dempewolf, *et al.* "Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, (No. 11): 4001-6.

³⁸ J.D. Nkurunziza, K. Tsowou, and S. Cazzaniga. "Commodity dependence and human development", *African Development Review*, 29, (No. 1, 2017): 27-41.

kesehatan. Pengalaman dari pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya tanggap darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari krisis kesehatan global. Keamanan kesehatan juga melibatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun yang tidak menular³⁹. Pencegahan ini mencakup vaksinasi, program kesehatan masyarakat, promosi gaya hidup sehat, dan pengendalian faktor risiko seperti polusi udara, air yang terkontaminasi, dan konsumsi makanan tidak sehat.

Keamanan kesehatan sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Ancaman lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, perubahan iklim, dan degradasi lahan dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, keamanan kesehatan mencakup upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan sebagai bagian dari strategi kesehatan publik yang lebih luas. Upaya untuk mengurangi polusi udara dan air sangat penting untuk keamanan kesehatan, karena polusi adalah salah satu penyebab utama penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan berbagai penyakit lainnya⁴⁰. Regulasi industri yang ketat, penggunaan teknologi bersih, dan promosi energi terbarukan adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi polusi dan melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan ancaman besar bagi keamanan kesehatan global.

Keamanan kesehatan tidak dapat dicapai tanpa kebijakan kesehatan yang efektif dan adil. Kebijakan kesehatan harus inklusif dan dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, keamanan kesehatan juga memerlukan pendanaan yang stabil dan cukup untuk mendukung sistem kesehatan yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk layanan kesehatan, penelitian medis, dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. Keamanan kesehatan global juga membutuhkan kesiapsiagaan

³⁹ W.N. Adger, *et al.*, *Human security*. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (Eds.), (Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014): 755-791.

⁴⁰ M. Miner, *et al.* "Water sharing between India and Pakistan: a critical evaluation of the Indus Water Treaty", *Water International* 34, (No. 2, 2009): 204-216.

yang lebih baik terhadap ancaman kesehatan yang muncul. Organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan respons global terhadap krisis kesehatan, serta dalam memberikan panduan dan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan⁴¹.

4. Keamanan Politik (*Political Security*)

Keamanan politik merupakan konsep fundamental yang merujuk pada perlindungan hak-hak asasi manusia, pemeliharaan stabilitas politik, dan pencegahan terhadap ancaman yang dapat mengganggu tatanan politik suatu negara. Keamanan politik memastikan bahwa individu dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan politik. Ini mencakup aspek-aspek seperti stabilitas pemerintahan, supremasi hukum, perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta penguatan institusi demokrasi⁴². Keamanan politik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut atau diskriminasi. Pemerintahan yang stabil memiliki legitimasi di mata rakyat, mampu merespons kebutuhan masyarakat, dan menjaga ketertiban serta mencegah kekacauan. Stabilitas ini juga mencakup transisi kekuasaan yang damai dan teratur, di mana pergantian kepemimpinan terjadi melalui proses demokratis seperti pemilihan umum yang bebas dan adil. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang harus diikuti oleh semua orang, termasuk mereka yang berkuasa, sehingga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Keamanan politik juga mencakup perlindungan hak-hak asasi manusia yang fundamental, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perlindungan hak-hak ini adalah inti dari keamanan politik karena tanpa perlindungan terhadap hak-hak dasar, individu dan kelompok dapat menjadi sasaran penindasan dan kekerasan politik. Kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak esensial dalam masyarakat demokratis. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan mereka, mengkritik pemerintah, dan

⁴¹ B.D. Ratner, *et al.*, "Addressing conflict through collective action in natural resource management", *International Journal of the Commons* 11, No. 2 (September 2017): 877-906.

⁴² F. W. Munger, & C. Seron, "Race, law, and inequality, 50 years after the civil rights era", *Annual Review of Law and Social Science* 13, (2017): 331-350.

berorganisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Keamanan politik mengharuskan bahwa hak-hak ini dilindungi dari ancaman seperti sensor, intimidasi, atau kekerasan dari pihak yang berwenang atau kelompok lain⁴³. Selain itu, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, juga merupakan elemen penting dari keamanan politik.

Keamanan politik sangat bergantung pada kekuatan dan integritas institusi demokrasi. Institusi-institusi ini, seperti parlemen, pengadilan, dan media, memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Penguatan institusi demokrasi mencakup pencegahan korupsi, peningkatan transparansi, dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan⁴⁴. Parlemen yang kuat dan mandiri adalah salah satu pilar keamanan politik. Parlemen yang efektif dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, membuat undang-undang yang melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kehendak rakyat. Peradilan yang independen juga merupakan penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak asasi manusia. Pengadilan yang bebas dari campur tangan eksekutif atau kelompok kepentingan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, media yang bebas memainkan peran penting dalam keamanan politik dengan menyediakan informasi yang akurat dan memfasilitasi debat publik.

Keamanan politik tidak dapat dicapai tanpa kebijakan publik yang mendukung stabilitas politik dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan politik yang berkualitas sangat penting untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak-hak dan tanggung jawab politik mereka⁴⁵. Kebijakan publik harus dirancang untuk memastikan inklusi politik, di mana semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap proses politik. Ini bisa melibatkan reformasi pemilu, pengurangan hambatan administratif, dan promosi partisipasi perempuan dan minoritas dalam politik. Pendidikan

⁴³ G. Shani, G. "Human Security as Ontological Security: A Post-Colonial Approach", *Postcolonial Studies* 20, (No. 3, 2017): 275-293.

⁴⁴ J. Gerring, and S. Thacker, "Political Institutions and Governance: Pluralism versus Centralism", *British Journal of Political Science* 34, No. 2 (2004): 295-3.

⁴⁵ S. Eckardt, "Political Accountability, Fiscal Conditions and Local Government Performance - Cross-sectional evidence from Indonesia", *Public Administration and Development* 28, (2008): 1-17.

politik juga merupakan alat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Dengan mendidik warga negara tentang hak-hak mereka, proses politik, dan pentingnya demokrasi, keamanan politik dapat diperkuat karena warga negara yang terinformasi lebih mungkin untuk terlibat secara konstruktif dalam politik dan mempertahankan hak-hak mereka.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam memediasi konflik, mempromosikan hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan institusi demokrasi di negara-negara yang sedang bertransisi. Upaya pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian juga merupakan bagian integral dari keamanan politik global. Ini melibatkan tidak hanya intervensi militer, tetapi juga pembangunan institusi, dukungan ekonomi, dan promosi dialog antar kelompok yang berseteru. Untuk mencapai keamanan politik, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan yang mendukung, pendidikan politik yang berkualitas, serta kerjasama internasional untuk mencegah dan menyelesaikan konflik⁴⁶. Dengan memastikan keamanan politik, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dilindungi, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik dan sosial.

F. Analisis dan Kritik Terhadap Konsep Cornelis Anthonie van Peursen

Pendekatan Cornelis Anthonie van Peursen dalam memahami kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan adaptif menawarkan berbagai keunggulan yang signifikan dalam analisis budaya dan interaksi sosial. Van Peursen menolak pandangan kebudayaan sebagai entitas yang statis dan tidak berubah. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kebudayaan adalah fenomena yang terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan waktu, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini membawa beberapa keunggulan yang penting dalam memahami kebudayaan secara lebih komprehensif. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan Van Peursen adalah kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana kebudayaan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi⁴⁷. Seiring dengan perkembangan teknologi

⁴⁶ Alan Doig, and David Norris, "Improving anti corruption agencies as organisations", *Journal of Financial Crime* 19, No. 3 (2012): 255-273. <https://doi.org/10.1108/13590791211243101>.

⁴⁷ Mogens K. Justesen and Christian Bjørnskov, "Exploiting the Poor: Bureaucratic

dan perubahan dalam struktur sosial, kebudayaan juga berkembang dan menyesuaikan diri. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana inovasi teknologi dan perubahan sosial berinteraksi dengan norma-norma budaya, menciptakan bentuk-bentuk baru dari praktik dan keyakinan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Pendekatan dinamis dan adaptif Van Peursen juga mendorong inovasi dalam praktik sosial dan budaya. Dengan melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang selalu siap beradaptasi dan berubah, pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, praktik baru, dan bentuk-bentuk ekspresi budaya yang inovatif. Ini memungkinkan kebudayaan untuk terus relevan dan vital, tidak hanya dalam mempertahankan identitas, tetapi juga dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Melalui pemahaman bahwa setiap kebudayaan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang, pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai lokal sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global⁴⁸. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptabilitas, dan evolusi, pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang cara kebudayaan berkembang, tetapi juga memberikan alat yang berguna untuk mengelola perubahan budaya dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks.

Sejauh ini telah banyak diuraikan, bahwa Van Peursen dikenal karena pandangannya yang dinamis dan adaptif terhadap kebudayaan. Meski pandangan ini menawarkan berbagai keunggulan dalam memahami perubahan budaya, konsep Van Peursen juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik terhadap pendekatan Van Peursen adalah kecenderungan untuk beroperasi pada tingkat abstraksi yang sangat tinggi. Pandangan Van Peursen tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berkembang seringkali diungkapkan dalam istilah yang sangat umum dan konseptual. Akibatnya, pendekatan ini mungkin kurang memberikan pedoman konkret bagi peneliti atau praktisi dalam menganalisis situasi budaya yang spesifik. Dengan kata lain, pendekatan ini bisa jadi terlalu teoritis dan kurang memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah budaya yang spesifik.

Kritik lain terhadap konsep Van Peursen adalah bahwa pendekatannya dapat dianggap kurang memperhatikan aspek-aspek struktural dalam kebudayaan, seperti kekuasaan, ekonomi, dan institusi

Corruption and Poverty in Africa", *World Development* Vol 58, (June 2014): 106-115.

⁴⁸ Anna Persson, Bo Rothstein, and Jan Teorell, "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem", *Governance* 26, No. 3, (July 2013): 449-471.

politik. Meskipun Van Peursen menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas kebudayaan, kritik menyebut bahwa pendekatan ini mungkin kurang menekankan bagaimana struktur-struktur sosial tertentu dapat membatasi atau menghambat perubahan budaya. Misalnya, dalam masyarakat di mana kekuasaan politik atau ekonomi sangat terkonsentrasi, kebudayaan mungkin tidak mudah berubah meskipun ada potensi atau kebutuhan untuk perubahan. Van Peursen cenderung melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang berkembang melalui adaptasi dan perubahan yang relatif harmonis⁴⁹. Kritik terhadap pandangan ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mungkin mengabaikan atau meremehkan peran konflik, ketegangan, dan resistensi dalam proses perubahan budaya. Dalam kenyataannya, perubahan budaya sering kali melibatkan benturan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda atau pandangan dunia yang bertentangan.

Meskipun Van Peursen menekankan bahwa kebudayaan harus dinamis dan adaptif, ada kritik yang menunjukkan bahwa pendekatan ini bisa saja meremehkan pentingnya kebudayaan tradisional yang stabil dan berkelanjutan. Beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa dengan terlalu menekankan adaptasi dan perubahan, pendekatan Van Peursen dapat mengabaikan nilai dari kebudayaan yang telah teruji oleh waktu dan memberikan stabilitas serta identitas yang kuat bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan yang tidak perlu pada masyarakat untuk berubah, bahkan ketika perubahan itu mungkin tidak diinginkan atau diperlukan⁵⁰. Pendekatan Van Peursen mungkin lebih relevan untuk kebudayaan yang berada dalam interaksi terus-menerus dengan kebudayaan lain, seperti dalam konteks globalisasi. Namun, bagi kebudayaan yang lebih terisolasi atau yang memiliki sedikit interaksi dengan dunia luar, konsep kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berubah mungkin kurang sesuai.

Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa definisi kebudayaan dalam pendekatan Van Peursen bisa dianggap terlalu luas atau tidak spesifik. Karena Van Peursen menekankan bahwa kebudayaan mencakup segala sesuatu yang berubah dan beradaptasi, definisi ini dapat menjadi terlalu inklusif. Akibatnya, menjadi sulit untuk membedakan antara perubahan budaya yang benar-benar signifikan dan perubahan yang bersifat lebih superfisial atau permukaan. Ambiguitas ini dapat

⁴⁹ Heather Marquette, and Caryn Peiffer, "Grappling With The 'Real Politics' of Systemic Corruption: Theoretical Debates Versus 'Real-World' Functions", *Governance* 31, No. 3, (July 2018): 499-514.

⁵⁰ C. Ward, "Probing Identity, Integration and Adaptation: Big Questions, Little Answers", *International Journal of Intercultural Relations* 37, No. 4 (July 2013): 391-404.

menghambat analisis yang lebih mendalam dan spesifik mengenai kebudayaan, karena konsep yang terlalu luas dapat menyulitkan dalam menilai mana aspek dari perubahan budaya yang benar-benar penting dan mana yang hanya bersifat sementara atau minor⁵¹. Dengan kata lain, pendekatan yang terlalu inklusif dapat mengaburkan pemahaman kita tentang dinamika kebudayaan, membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kunci yang sebenarnya mendorong atau menahan perubahan budaya yang lebih substansial.

Penutup

Kebudayaan berperan krusial sebagai fondasi dinamis yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Van Peursen memandang kebudayaan bukan hanya sebagai warisan statis, tetapi sebagai entitas yang terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Dalam konteks keberlanjutan, kebudayaan menyediakan kerangka nilai, norma, dan praktik yang mendukung pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta inovasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam hal keamanan insani, kebudayaan berfungsi sebagai penjaga identitas kolektif dan kohesi sosial, yang keduanya penting untuk stabilitas dan harmoni masyarakat. Kebudayaan yang dinamis dan adaptif, sebagaimana dipahami oleh Van Peursen, memungkinkan komunitas untuk menghadapi perubahan dan krisis tanpa kehilangan inti dari identitas mereka.

Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Van Peursen, kebudayaan sebagai strategi keberlanjutan dan keamanan insani menawarkan pendekatan yang holistik dan berorientasi jangka panjang. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai alat untuk inovasi, adaptasi, dan kelangsungan hidup dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, kebudayaan menjadi pilar utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi keamanan yang melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk memperdalam pemahaman tentang kebudayaan sebagai strategi berkelanjutan, arah

⁵¹ M. Saleh, S. Kholil, & A.T. Sikumbang, "Chinese Ethnic Communication Pattern in The Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (Birci-Journal)* 1, (No. 4): 114-123.

penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada beberapa area kunci yang akan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai peran kebudayaan dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan kebudayaan dalam membangun ketahanan dan keamanan insani dapat diwujudkan melalui beberapa strategi praktis yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam berbagai aspek keamanan. Pemerintah dan lembaga keamanan dapat merancang strategi yang memperkuat nilai budaya masyarakat setempat, dengan melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal untuk membangun kepercayaan serta relevansi kebijakan. Pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah dan komunitas juga penting, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan harmoni sebagai bagian dari keamanan. Selain itu, pemerintah perlu menjalin kemitraan berkelanjutan dengan komunitas melalui dialog yang konsisten untuk membangun ketahanan sosial. Pembangunan infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang publik juga menjadi prioritas, demi mendukung kesejahteraan dan keamanan fisik serta emosional masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Angga Nurdin Rahmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- EM. Wilson, *Organizational Culture as a Framework for male and Female progression and preferred management style*. (PhD Thesis, Liverpool John Moores University).
- Gordon, I. J., Prins, H. H. and Squire, G. R. (eds.), *Food Production and Nature Conservation: Conflicts and solutions*. (London: Routledge, 2017).
- Frances, Stewart, *Development and Security, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3*. (London: University of Oxford, 2004).
- Harding, Sandra, *Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?. Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.). (New York: Routledge, 1993)
- Kanowski P, Yao D, Wyatt S. SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan Hutan - 'Benang Emas.' Dalam: Katila P, Pierce Colfer CJ, de Jong W, Galloway G, Pacheco P, Winkel G, eds. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Dampaknya terhadap Hutan dan Masyarakat*. (Cambridge University Press; 2019)

- Roberts, David, *Human Insecurity Global Structures of Violence*. (New York: Zed Book, 2008)
- Sandbrook, C., Walpole, M. (eds.) *Biodiversity conservation and poverty alleviation: Exploring the evidence for a link (1st ed.)*, (Hoboken: John Wiley & Sons).
- Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007).
- UNDP, *Human Development Report 1994*. (New York: Oxford University Press, 1994).
- S Neil Mac Farlane and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, (Bloomington: Indiana University Press, 2006).
- Van Peursen, C. A, *Filsafat Ilmu*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014)
- _____, *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta: Kanisius, dan BPK Gunung Mulia, 1976).
- _____, *Susunan Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- _____, *Strategi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2018)

Jurnal

- Adel, Amr, and Noor HS Alani, "Human-Centric Collaboration and Industry 5.0 Framework in Smart Cities and Communities: Fostering Sustainable Development Goals 3, 4, 9, and 11 in Society 5.0", *Smart Cities* 7, No. 4. <https://doi.org/10.3390/smartcities7040068>.
- Adger, W.N. et al., *Human security. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (Eds.)). Cambridge: Cambridge University Press, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014.
- Angelsen, A. and Rudel, T. K. "Designing and implementing effective REDD+ policies: A forest transition approach", *Review of Environmental Economics and Policy* 7, No. 1, 2013.
- Anna Persson, Bo Rothstein, and Jan Teorell, "Why Anticorruption Reforms Fail – Systemic Corruption as a Collective Action Problem", *Governance* 26, (No. 3, July 2013).
- Barbier, E. B, "Poverty, Development, and Environment", *Environment and Development Economics* 15, No. 4, (2010).

- Barrett, C. B. "Rural poverty dynamics: Development policy implications", *Agricultural Economics* 32, No. 1, (2005).
- Call, M., Mayer, T., Sellers, S. *et al.*, "Socio-environmental drivers of forest change in rural Uganda", *Land Use Policy* 62, (2017).
- Cheng, S. H., Ahlroth, S., Onder, S. *et al.* "What is the evidence for the contribution of forests to poverty alleviation? A systematic map protocol", *Environmental Evidence* 6, No. 1, (2017).
- Doig, A., & Norris, D. "Improving anti-corruption agencies as organisations", *Journal of Financial Crime* 19, No. 3. (July 2012) <https://doi.org/10.1108/13590791211243101>.
- Doswald, N., Munroe, R., Roe, D., *et al.*, "Effectiveness of ecosystem-based approaches for adaptation: Review of the evidence-base", *Climate and Development* 6, No. 2, (2014).
- Eckardt, S. "Political Accountability, Fiscal Conditions and Local Government Performance - Cross-sectional evidence from Indonesia", *Public Administration and Development* 28, (2008).
- Fukuda-Parr, S. "From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development", *Gender & Development* 24, No. 1. (February, 2016)
- Gerring, J.; Thacker, S., Political Institutions and Governance: Pluralism versus Centralism. *British Journal of Political Science* 34, No. 2, (2014).
- Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R. *et al.* "Food security: The challenge of feeding 9 billion people", *Science* 327. (2010)
- Haferkamp, Hans, and Neil J. Smelser, editors *Social Change and Modernity*. (Berkeley: University of California Press, c1992 1991) <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6000078s/>.
- Hariram, N. P., K. B. Mekha, Vipinraj Suganthan, and K. Sudhakar. "Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability", *Sustainability* 15, No. 13, (2023). <https://doi.org/10.3390/su151310682>.
- Heather Marquette and Caryn Peiffer, "Grappling With The 'Real Politics' of Systemic Corruption: Theoretical Debates Versus 'Real-World' Functions", *Governance* 31, No. 3, (July 2018).
- Ickowitz, A., Jones, A., Rowland, D., Powell, F. and Sunderland, T. "Agricultural intensification, dietary diversity, and markets in the global food security narrative", *Global Food Security* 20, (2019).
- J.D. Nkurunziza, K. Tsowou and S. Cazzaniga. "Commodity dependence and human development", *African Development Review* 29, No. 1, (2017).

- Khoury, C. K., Bjorkman, A. D., Dempewolf, H. *et al.* "Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security)", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, No. 11. (July 17, 2013)
- Le Blanc, D. "Towards integration at last? The Sustainable Development Goals as a network of targets", *Sustainable Development* 23, No. 3, (2015).
- Losee, John, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Fourth Edition New York: Oxford University Press, (2017).
- Miner, M. *et al.* "Water sharing between India and Pakistan: a critical evaluation of the Indus Water Treaty", *Water International* 34, No. 2, (2009).
- Mogens K. Justesen and Christian Bjørnskov, "Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa", *World Development* 58, (June 2014).
- Munger, F. W., & Seron, C. (2017), "Race, law, and inequality, 50 years after the civil rights era", *Annual Review of Law and Social Science* 13, (2017).
- Pattanayak, S. K. and Sills, E. O, "Do tropical forests provide natural insurance? The microeconomics of non-timber forest product collection in the Brazilian Amazon", *Land Economics* 7, No. 4, (2001)
- Persson, A., Weitz, N. and Nilsson, M. "Follow-up and review of the Sustainable Development Goals: Alignment vs. internalisation", *RECIEL* 25, No. 1, (2016).
- Ratner, B.D. *et al.*, "Addressing conflict through collective action in natural resource management", *International Journal of the Commons* 11, No. 2, (2017).
- Robeyns, I. "The Capability Approach: A Theoretical Survey", *Journal of Human Development* 6, No. 1, (2005).
- Rulandari, N. "Study of Sustainable Development Goals (SDGS) Quality Education in Indonesia in the First Three Years", *Budapest International Research and Critics Institute Journal* 4, No. 2, (2021).
- Saleh, M., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. "Chinese Ethnic Communication Pattern in The Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 1, No. 4 (2018).
- Shani, G. "Human Security as ontological security: a post-colonial approach", *Postcolonial Studies* 20, No. 3, (2017).
- Singh, V, "An Impact and Challenges of Sustainable Development in Global Era", *Journal of Economics and Development Studies* 2, No. 2, (2014).

- Van Niekerk, Arno J. "Inclusive Economic Sustainability: SDGs and Global Inequality", *Sustainability* 12, No. 13, (2020). <https://doi.org/10.3390/su12135427>.
- Ward, C. "Probing Identity, Integration and Adaptation: Big Questions, Little Answers", *International Journal of Intercultural Relations* 37, No. 4. (July, 2013)
- Wendy Brown, *Undoing the Demos Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution* Cambridge: MIT Press, (2011).